
**ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

EVRIINA

Fakultas Ekonomi
Universitas Adiwangsa Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) Menganalisis kemampuan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penerimaan daerah. 2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten Tanjung jabung Timur. 3) Menganalisis hubungan PAD dengan belanja daerah Kabupaten Tanjabtim. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan waktu (time series), dengan teknik analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan korelasi sederhana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) Secara rata-rata selama periode 2001-2010 Kemampuan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penerimaan daerah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, penerimaan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur PAD yang tertinggi terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 131,21 %. 2) Dari hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diketahui bahwa: Infrastruktur Ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nilai koefisien sebesar 0,0525. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung jabung Timur selaras dengan pengeluaran pemerintah untuk belanja modal, semakin besar pengeluaran pemerintah untuk belanja modal maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Investasi Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nilai koefisien sebesar 0,0598. kredit investasi yang di berikan berdasarkan lokasi proyek di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi signifikan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Objek Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nilai koefisien sebesar 0,8538. 3) Selama periode penelitian dari tahun 2001-2010 rata-rata kontribusi sisa kas pada kas daerah terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 32.928 Milyar. Hubungan PAD dengan belanja daerah pada penelitian ini memberikan hasil bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara PAD dengan belanja daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja daerahpun semakin tinggi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat, serta juga meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan.

Untuk melaksanakan keadilan dan kekhususan suatu daerah, maka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah. Potensi keanekaragaman daerah, Peluang dan tantangan persaingan global akan memberikan kewenangan yang seluas- luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penerapan prinsip *good governance* pada masa reformasi menuntut adanya perubahan paradigma berfikir dan bertindak bagi semua elemen birokrasi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Perubahan pandangan berfikir tersebut diarahkan untuk menghasilkan suatu manajemen keuangan pemerintah yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan, dan efektif yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supermasi hukum di bidang keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo : 2002)

Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan daerah yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dan

ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

berjenis dibanding dengan lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu dapat terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah atau disebut juga dengan ketimpangan horizontal.

Landasan Teori

Konsep Keuangan Daerah

Pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah.

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta penerimaan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal, yaitu : alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar. (Musgrave dan Musgrave, 1993).

Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain,

ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. (Tambunan, 2000).

Berkenaan dengan keuangan daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar bagi pengelolaan keuangan daerah. Dengan ditetapkannya kedua Undang-Undang ini (masing-masing tanggal 7 Mei 1999 dan 19 Mei 1999), maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa tidak berlaku lagi. Sebelum undang-undang yang mengatur hubungan fiskal (keuangan) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu UU Nomor 32 Tahun 1956 diganti dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, sumber-sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ; sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah. Adapun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah meliputi ; pajak verponding, pajak verponding Indonesia, pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, pajak jalan, pajak potong hewan, pajak kopra dan pajak pembangunan I;
2. Sebagian dari hasil pemungutan pajak negara tertentu: bea masuk, bea keluar dan cukai diserahkan kepada daerah. Pajak negara tertentu adalah pajak peralihan, pajak upah, pajak materai, pajak kekayaan dan pajak perseroan;
3. Ganjaran, subsidi, dan bantuan diberikan kepada daerah dalam hal-hal tertentu. (Kuncoro, 1997).

Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penganggaran daerah termasuk kategori perencanaan jangka pendek (perencanaan tahunan) yang merupakan bagian dari perencanaan jangka

ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

menengah dan perencanaan jangka panjang. Perencanaan daerah terdiri atas: formulasi kebijakan anggaran (*budget operational planning*). Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumberdaya. Dalam penyusunan anggaran, rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah perlu diperhatikan. Salah satu fungsi anggaran adalah membantu manajemen pemerintah dalam pengambilan keputusan, dan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja unit kerja dibawahnya. Kebutuhan pengeluaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengalihan tingkat kinerja bagi keberadaan program pemerintah baik yang berasal dari Kabupaten maupun Provinsi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peran anggaran dalam penentuan arah kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat pada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi yang dimilikinya.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman Pada UU No 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas.
- b. Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.
- c. Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

Disisi lain keuangan daerah adalah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah semakin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa DAU dan DAK, tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat daerah. Selain itu, peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab (Elia **Sumber-Sumber Penerimaan Daerah**)

ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal

6 UU No. 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan asli Daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak daerah (TAX)

2. Retribusi daerah (R)

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PROFT)

4. Lain-lain PAD yang sah (OTHS)

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18

Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu dengan memperhitungkan kewajaran serta situasi dan kondisi penelitian (Surachmad 1990).

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder. Yang dimaksud dengan analisis data sekunder ini adalah data yang telah dilaporkan suatu badan, organisasi dimana badan atau organisasi itu sendiri tidak langsung mengumpulkan, melainkan diperoleh dari pihak-pihak lain yang telah mengumpulkannya terlebih dahulu dan menerbitkannya (Singarimbun 1989).

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya yang berwujud dokumentasi. Sementara itu analisis data sekunder dilakukan terhadap data yang dikumpulkan, riset kepustakaan dilakukan dengan mempelajari teori-teori, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti secara informasi relevan yang berasal dari kepustakaan, laporan-laporan, artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan terdiri dari :

1. APBD Kabupaten Tanjabtim periode 2001-2010
2. PDRB Kabupaten Tanjabtim Periode 2001-2010
3. Tanjabtim dalam angka 2001-2010

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari BPS kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Metode Analisis Data

1. Kemampuan PAD

Untuk mengukur derajat kemampuan PAD digunakan ukuran sebagai berikut :

$$K.PAD = (PAD/TPD) \times 100\% \dots\dots\dots$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

K.PAD = Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan daerah

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi PAD

**ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Untuk menguji hipotesis kedua digunakan analisis regresi linear berganda dengan data panel atau pooling data. Adapun model umumnya adalah sebagai berikut (Gujarati, 1995:280) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu_i \dots\dots\dots$$

Dimana :

Y : PAD

X1 : Infrastruktur Ekonomi

X2 : Investasi Daerah

X3 : Jumlah Objek Pajak Daerah

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$: Koefisien regresi

α : Konstanta

μ_i : Error term

3. Hubungan PAD dan Belanja Daerah

Analisis Koefisien Korelasi Pearson

Hipotesis ketiga diuji dengan menggunakan model analisis *Koefisien Korelasi Pearson*. Alat uji analisis ini bertujuan melihat apakah ada hubungan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja daerah di kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Operasional Variabel

Untuk memperoleh pemahaman analisis yang baik maka perlu mengetahui lebih jauh mengenai variabel penelitian dan defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana

**ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

untuk membiayai kegiatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Belanja Modal (BM) adalah jumlah anggaran dalam APBD yang penggunaannya untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya, yang diukur dalam satuan rupiah.
3. Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.
4. Bagi hasil Pajak dan bukan pajak adalah penerimaan dari pajak hanya diperoleh dari pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pungutan atau bea yang dibayar dalam perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditambah penerimaan bukan pajak diantaranya adalah penerimaan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya, seperti sumber daya hutan, pertambangan umum, perikanan, dan khususnya pengambilan minyak bumi dan gas.
5. Total pendapatan Daerah adalah seluruh pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain.
6. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah.
7. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang yang digambarkan dengan kenaikan GNP riil dari satu tahun ketahun tertentu, sedangkan pengertian riil berarti tidak ada pengaruh tingkat inflasi.
8. Infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur fisik dan jasa layanan yang diperoleh darinya untuk

ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- memperbaiki produktivitas ekonomi dan kualitas hidup seperti transportasi, telekomunikasi, kelistrikan, dan irigasi.
9. Investasi daerah adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 10. Sumbangan daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela, yang tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang.
 11. TPD adalah total penerimaan daerah baik yang berasal dari PAD dan dana perimbangan dihitung dalam satuan rupiah per tahun belanja.

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN Kondisi Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Wilayah dan Kondisi Geografis

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada di Pantai Timur Pulau Sumatra memiliki letak geografis yang strategis karena wilayah penyangga daerah Segi Tiga Pertumbuhan Ekonomi, yang dikenal dengan istilah SIJORI (Singapura-Johor-Riau).

Keberadaannya terletak antara $0^{\circ}53'$ Lintang Selatan sampai $1^{\circ}41'$ Lintang Utara atau antara $103^{\circ}23'$ - $104^{\circ}31'$ Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatra Selatan, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut China Selatan, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kabupaten Muaro Jambi.

**ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Jumlah Desa/Kelurahan di kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Mendahara	1	8
2.	Mendahara Ulu	1	6
3.	Geragai	1	8
4.	Dendang	1	6
5.	Muara Sabak Timur	7	0
6.	Muara sabak Barat	2	10
7.	Kuala Jambi	2	4
8.	Rantau Rasau	1	10
9.	Berbak	1	5
10.	Nipah Panjang	2	8
11.	Sadu	1	8
	Jumlah	20	73

Sumber : BPS tanjung Jabung Timur 2006-2010

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di daratan yang sangat bervariasi mulai dari dataran rendah berawa gambut dengan ketinggian antara 0-10 meter diatas permukaan laut sampai pada bentuk topografi yang sedikit bergelombang dan berbukit dengan ketinggian 10-35 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Tanjung Jabung timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter pertahun atau 223-241,6 milimeter perbulan dengan rata-rata hujan perbulan sekitar 11-

13 hari.

Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai

ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

masuk dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta perkiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang.

Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti: pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator kinerja makro ekonomi yang paling kerap digunakan dan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. PDRB merupakan totalitas nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan setelah dikurangi biaya produksinya dari berbagai unit usaha di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung timur dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) sektor: (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan penggalan, (3) Industri pengolahan, (4) Listrik, gas, dan air bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, hotel, dan restoran, (7) Pengangkutan dan komunikasi, (8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, (9) Jasa-jasa. Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (current price) maupun berdasarkan harga konstan (constant price).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemampuan PAD Dalam Penerimaan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah berusaha memberikan peluang yang besar kepada daerah otonomi untuk mencari dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, untuk menentukan besarnya biaya pembangunan tersebut, maka diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mencari sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, diantaranya menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Didalam pengusahaannya disesuaikan dengan kapasitas daerah berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

**ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan daerah

Tahun	PAD	Perkembangan	Penerimaan Daerah	Kontribusi (%)	Elastisitas
2001	2.650.685.296	141,68	23.481.515.317	11,29	1,24
2002	6.188.081.218	133,96	37.044.153.655	16,70	1,15
2003	7.560.244.892	101,60	224.813.079.226	3,09	0,95
2004	7.727.730.159	97,13	230.307.484.451	3,36	0,92
2005	7.427.173.703	85,96	212.480.960.297	3,50	1,07
2006	11.526.328.721	121,28	410.189.856.466	2,81	0,92
2007	15.439.090.653	141,51	509.725.223.313	3,03	1,15
2008	21.750.436.867	150,16	515.337.335.055	4,22	1,43
2009	20.900.082.653	116,46	571.079.462.984	3,66	1,12
2010	19.772.307.234	110,47	661.184.042.185	2,99	1,0
2011*	17.939.766.000	-	602.510.406.000	2,98	-

Sumber : Dinas pendapatan, pengelolaan Keuangan daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keterangan * : Data Sementara

Berdasarkan tabel diatas tergambar bahwa selama periode 2001-

2010 PAD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Laju perkembangan penerimaan PAD di kabupaten Tanjung Jabung Timur tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 150,16 persen. Tingginya laju penerimaan PAD pada tahun ini tidak terlepas dari perkembangan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sangat pesat yang tercermin dari perkembangan ekonomi. Laju perkembangan penerimaan PAD terendah terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 85,96. Rendahnya perkembangan penerimaan PAD pada tahun ini disebabkan aktivitas ekonomi yang kurang begitu pesat, menyusul kenaikan BBM pada tahun 2005 yang menyebabkan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Secara rata-rata selama periode 2001-2010 laju

ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

perkembangan penerimaan PAD di Kabupaten Tanjung Jabung timur adalah 12,02 persen.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi PAD

Salah satu indikator untuk mengetahui kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanjanya, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Semakin tinggi kemampuan PAD dalam membiayai belanja tidak langsung dan langsung maka daerah tersebut akan semakin mandiri.

Adapun faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung Pemerintah Tanjung Jabung Timur

Belanja Tidak Langsung merupakan alokasi belanja yang ditujukan untuk pegawai, belanja barang modal dan perjalanan dinas. Hal ini berarti belanja tidak langsung hanya ditujukan untuk kegiatan operasional dalam menjalankan pemerintahan. Semakin aktif dan semakin bertambah beban kerja pemerintah daerah akan menuntut pembiayaan Tidak Langsung yang semakin besar pula. Selama periode 2001-2010 belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.

Dari sisi pencapaian target alokasi belanja tidak langsung Kabupaten Tanjung jabung Timur, pada tahun 2001 hanya mampu direalisasikan sebesar 63,37 persen sementara pada tahun 2002 realisasi target alokasi belanja tidak langsung pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya mampu direalisasikan sebesar 58,57 persen. Tahun 2003 realisasi belanja tidak langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai Rp. 96.764.566.705 atau mampu direalisasikan sebesar 50,17 persen, jumlah ini mengalami penurunan Tahun 2004 realisasi mencapai target adalah sebesar Rp. 80.386.356.611 atau mampu direalisasikan sebesar 51,37 persen, tahun

ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2005 realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar 50,47 persen dari target sebesar 92,549 Milyar.

Belanja Langsung Pemerintah Tanjung Jabung Timur

Belanja langsung adalah belanja yang dialokasikan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diperuntukkan pembangunan Infrastruktur Langsung, program pembangunan dan kegiatan produktif lainnya. Belanja Langsung sangat penting guna mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Selama periode 2001-2010 belanja langsung di kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan kecenderungan meningkat, sebagaimana tergambar pada tabel 5.3 berikut :

Pencapaian realisasi belanja langsung di Kabupaten Tanjung jabung Timur pada Tahun 2001 adalah sebesar 36,63 persen dari target sebesar Rp. 31,287 Milyar. Tahun 2002 realisasi belanja langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar 41,43 persen, sementara di Tahun 2003 realisasi yang mampu tercapai adalah sebesar 49,83 persen dari target sebesar Rp. 106,330 Milyar, sedangkan pada tahun 2004 target belanja langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mampu tercapai adalah sebesar Rp. 118,883 Milyar atau mampu direalisasikan sebesar 48,63 persen. Tahun 2005 realisasi belanja langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mampu dicapai adalah sebesar 49,53 persen, sementara pada tahun 2006 realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp. 248,152 Milyar atau sebesar 87,49 persen, sedangkan di tahun 2007 realisasi belanja langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar 88,84 persen, Tahun 2008 realisasi adalah sebesar 71,22 persen, dan pada tahun 2009 realisasi sebesar 78,74 persen dari target sebesar Rp. 525,090 Milyar. Secara rata-rata selama periode 2001-2010 realisasi belanja langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar 55,25 persen pertahun.

Pertumbuhan Ekonomi

PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2001 sebesar Rp 259,178. Pada tahun 2010 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Selama kurun waktu 2001-2010 rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2001 yakni sebesar 6,65 persen.

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2001 adalah Rp 802,623 atau rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku selama tahun 2001-2010 sebesar 9,1 persen.

Investasi

Jumlah Kredit yang diberikan oleh Bank umum dan BRI berdasarkan lokasi proyek Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bertujuan untuk investasi seperti terlihat pada tabel 5.6. Jumlah kredit yang diberikan mengalami peningkatan dari tahun ketahun pada tahun 2001 sebesar Rp 454.000 milyar dan pada tahun 2010 baru memberikan kredit untuk investasi sebesar Rp 166.992 milyar.

Pajak Daerah

Salah satu penyumbang PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah penerimaan yang bersumber dari pajak daerah dengan rata-rata kontribusi 10,53 persen. Dari sisi pertumbuhannya dapat dikemukakan bahwa sampai tahun 2003 menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 19,31 persen pada tahun 2002 dan 37,90 persen pada tahun 2003. Namun demikian, pada tahun 2004 dan 2005 pertumbuhannya mengalami angka negatif masing-masing sebesar 13,06 persen dan 36,37 persen (meskipun Tahun 2005 adalah perhitungan akhir Oktober, namun sampai akhir tahun diperkirakan capaian penerimaan tidak akan melebihi penerimaan Tahun 2004).

ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Secara umum, terdapat dua faktor penyebab turunnya penerimaan pajak daerah pada tahun 2004 dan 2005 ini. Pertama, sesuai dengan UU No. 34, 2001 pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang semula menjadi bagian dari pajak daerah ditarik kembali menjadi kewenangan propinsi, dan dalam penerimaan daerah termasuk dalam pos penerimaan dari propinsi. Ketentuan ini mulai diberlakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2004. Kedua, upaya ekstensifikasi objek pajak terkendala dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang diberlakukan di tingkat pusat.

Terlihat bahwa selama periode tahun 2001-2010 belum terdapat penambahan objek pajak yang memungkinkan daerah untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah. Bahkan sesuai dengan UU No. 34 tahun 2001, salah satu objek pajak yang selama ini dikelola oleh pemerintah kabupaten yaitu pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan telah ditarik kembali menjadi kewenangan propinsi.

Infrastruktur Daerah

Sebagai bagian dari infrastruktur strategik, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi dan peran penting dalam pembangunan khususnya sebagai urat nadi perekonomian. Selama periode 2001-2010 sarana prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam menunjang perekonomian masyarakat sekaligus peluang untuk meningkatkan investasi, baik itu investasi ekonomi maupun sosial. Ketersediaan sarana jaringan transportasi yang menghubungkan seluruh sumber perekonomian masyarakat akan meningkatkan perputaran barang dan jasa antar daerah, kondisi jalan yang baik akan mengurangi biaya operasional bagi para pelaku usaha. Yang kesemuanya itu pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Perkembangan jalan di kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dari 855,35 Km pada tahun 2006 meningkat menjadi 925,23 Km pada tahun 2010 dengan total jalan yang

ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

telah dibangun dan ditingkatkan konstruksinya sehingga dapat dilewati kendaraan roda empat.

Kondisi jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun

2006 dengan kondisi baik hanya sebesar 17,22 persen sedangkan jalan dengan kondisi buruk sebesar 41,44 persen selanjutnya jalan dengan kondisi sedang sebesar 41,34 persen, ini tergambar bahwa persentase kondisi jalan yang buruk dan kondisi jalan yang sedang lebih besar dari kondisi jalan yang baik. Ditahun 2009 terjadi perubahan dimana pada jalan dengan kondisi buruk sebesar 42,95 persen sedangkan kondisi baik sebesar 45,73 persen dan dengan kondisi sedang turun menjadi 11,33 persen, ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kondisi jalan dari yang sedang menjadi baik. Hal ini sejalan dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui dinas Pekerjaan Umum yang menganggarkan sebesar 42 persen sampai dengan 48 persen dari biaya langsung APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan besaran sekitar 210 Milyar sampai dengan 290 Milyar Rupiah pertahun untuk peningkatan jalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara rata-rata selama periode 2001-2010 Kemampuan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penerimaan daerah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, penerimaan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur PAD yang tertinggi terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 131,21 %.
2. Dari hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diketahui bahwa:
 - a. Infrastruktur Ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

**ANALISIS KEMAMPUAN PAD DAN PENGALOKASIANNYA PADA BELANJA
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nilai koefisien sebesar 0,0525. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung jabung Timur selaras dengan pengeluaran pemerintah untuk belanja modal, semakin besar pengeluaran pemerintah untuk belanja modal maka akan tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi.

- b. Investasi Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nilai koefisien sebesar 0,0598. kredit investasi yang di berikan berdasarkan lokasi proyek di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi signifikan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - c. Jumlah Objek Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nilai koefisien sebesar 0,8538.
3. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah, menunjukkan bahwa pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah memiliki korelasi atau hubungan positif yang kuat 89,8 persen.
Jika dilihat dari hubungan kausalitas, menunjukkan bahwa hubungan kausalitas antara pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah adalah terjadi hubungan kausalitas satu arah dari Belanja Daerah ke pendapatan Asli Daerah (PAD), artinya Belanja Daerah mempengaruhi PAD.